



Jalan Dibangun Bertahap

Dianggarkan Setiap Tahun Sejak 2019

PONTIANAK - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ka-

limantan Barat (Kalbar) Iskandar Zulkarnaen memberikan penjelasan terkait tuntutan massa aksi demo yang dilakukan sebagian masyarakat terkait ruas jalan Sintang-Semubuk di Kabupaten Sintang. Ruas jalan yang

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



DINAS PUPR KALBAR FOR PONTIANAK POST

PEKERJAAN JALAN: Proses pengerjaan ruas jalan Sintang-Semubuk oleh para pekerja dari Dinas PUPR Kalbar.

Jalan Dibangun Bertahap

Sambungan dari halaman 1

notabene menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) itu menurutnya tak pernah absen dibangun secara bertahap sejak 2019 lalu.

Iskandar menegaskan bahwa pemprov telah berkomitmen untuk melakukan sejumlah perbaikan terhadap ruas jalan yang menjadi kewenangannya. Termasuk ruas Jalan Sintang-Semubuk.

"Gubernur Kalbar tidak pernah merampot (berbohong) dalam hal penanganan jalan. Hal ini dibuktikan dengan fokusnya Pemprov Kalbar dalam penanganan ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi," ungkapnya kepada awak media, Jumat (28/10).

Ia melanjutkan, mengingat posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, maka perbaikan atau pembangunan jalan tidak dapat dilakukan sekaligus. Semua dibangun masyarakat dapat memahami keterbatasan anggaran yang dimiliki pemprov. Anggaran yang terbatas itu juga harus dibagi untuk pembangunan ruas jalan lain yang membutuhkan.

"Penanganan ruas jalan di Kalbar yang belum mantap itu sekitar 499.065 kilometer. Dalam kondisi keuangan terbatas, tentunya diperlukan strategi penanganan yang baik," katanya.

Di sisi lain, pihaknya juga telah berupaya melakukan tata kelola secara ketat dan semaksimal mungkin dalam mengelola anggaran tersebut. Termasuk mempertimbangkan aspek skala prioritas. Dengan anggaran yang minimal, pihaknya harus cermat dan tepat dalam membagi rata pembangunan jalan di seluruh daerah.

"Apabila kami menangani jalan dengan mekanisme parsial (spot-spot) sesuai keluhan masyarakat, kami tidak akan dapat menyelesaikan masalah

secara bertahap, sesuai dengan porsi masing-masing di seluruh wilayah di provinsi ini.

"Ambil contoh untuk ruas jalan Sintang-Semubuk, sejak tahun 2019 telah ditangani secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah provinsi," terangnya.

Menurut Iskandar, penanganan ruas jalan Sintang-Semubuk pada tahun 2019 telah dianggarkan sebesar Rp11,6 miliar. Kemudian pada tahun 2020, terjadi refocusing (pengalihan) anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19 Kalbar, sehingga di tahun tersebut ditunda penganggarannya.

Namun pada tahun 2021, penganggaran untuk ruas jalan tersebut kembali dilanjutkan dengan nilai sebesar Rp35,5 miliar. Kemudian pada tahun 2022 kembali dianggarkan sebesar Rp16,88 miliar dan tahun 2023 juga sudah diusulkan penanganannya sebesar Rp18 miliar.

Oleh karena itu, ia mengharapkan jalan mantap secara baik, dan menjadikan anggaran yang dikeluarkan akan boros dan tidak berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat pemanfaatan jalan," paparnya.

Tak hanya itu, Iskandar juga mengharapkan adanya kesadaran para pengguna jalan. Khusus angkutan perkebunan sawit, hendaknya jangan melintasi jalan dengan beban atau tonase yang berlebihan. Hal itu bisa berdampak pada rendahnya pelayanan fungsional jalan untuk masyarakat umum.

Untuk masyarakat umum, ia berharap bisa lebih bijak memandang masalah ini dan bersabar untuk mendapatkan jalan yang lebih layak sesuai dengan skala prioritasnya. "Kami tetap berusaha secara maksimal dalam mengusahakan dukungan anggaran ke pemerintah pusat, agar penanganan jalan di ruas-ruas yang panjang dan kondisi rusak berat dapat ditangani secara optimal," pungkasnya. (bar)